

Bentuk Komite Etik

KPK Tunggu Kesimpulan Pengawas Internal

[JAKARTA] Pengawas Internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sejumlah bukti berupa foto dari pelaksanaan tugas (Plt) Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto terkait pertemuan politik Kena KPK, Abraham Samad dengan PDIP menjelang Pilpres lalu. Selanjutnya, Pengawas Internal akan menggali sejumlah informasi lebih dalam sebelum menyimpulkan dan memberikan rekomendasi pada pimpinan KPK untuk membentuk Komite Etik.

"Kita apresiasi pak Hasto bertemu dengan Pengawas Internal KPK dan selanjutnya kita tunggu dari hasil penelusuran lebih lanjut tim PI," kata Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/2).

Johan menyatakan, selain bukti berupa foto dari Hasto, Pengawas Internal juga masih menunggu bukti-bukti lain. Tak menutup kemungkinan, Pengawas Internal akan meminta keterangan dari sejumlah pihak lain. "Tentu ada mekanisme pembentukan Komite Etik. Mengenai laporan dari pak Hasto tadi tentu tidak hanya pak Hasto, akan diundang juga untuk memberikan informasi data atau fakta apapun menyangkut tuduhan-tuduhan terutama kepada pak AS (Abraham Samad)," katanya.

Johan menjelaskan, setelah bukti dirasa cukup, Pengawas Internal akan menyerahkan hasil analisis berupa rekomendasi penben-



ANTARA FOTOFRASE YUDI THOMA

Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan sesuai bertemu dengan Pengawas Internal KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (9/2).

tukan Komite Etik kepada pimpinan KPK selain yang terindikasi melanggar kode etik. Setelah berunding dengan penasihat KPK, pimpinan KPK akan memutuskan membentuk komite etik.

Usai bertemu dengan Pengawas Internal KPK, Hasto mengaku telah menyerahkan sejumlah bukti berupa foto, dan keterangan saksi-saksi yang memperkuat keterangannya. Menurut Hasto, bukti-bukti yang disampaikan telah mencukupi untuk menjadi persyarafan pembentukan Komite Etik.

Meski mendorong dibentuknya Komite Etik, Hasto menyatakan, secara pribadi tidak ada niat untuk memperlemah KPK. Menurutnya, KPK merupakan lembaga yang teramat penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Dengan tugas yang maha penting itu, kata Hasto, KPK seharusnya tidak menjadi alat oleh salah seorang

pimpinannya yang memiliki kepentingan politik.

Sementara itu pakar hukum Frans Hendra Winarta berpendapat, KPK harus segera membentuk Komite Etik setelah, Pengawas Internal mengklarifikasi dan menerima bukti-bukti dari Plt Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Senin (9/2).

"Untuk menjaga wibawa KPK sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya saat ini perlu segera dibentuk Komite Etik. Samad adalah salah satu pimpinan periodik KPK dan nanti ada penggantian-penggantinya, yang harus dijaga lembaganya bukan personalinya," katanya.

Tak Mengganggu

Dua Pimpinan KPK Jilid III yakni, Abraham Samad dan Adnan Pandu Praja pernah dikenakan sanksi etik terkait bocornya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) atas nama Anas Urbaniungrum tahun 2013. Samad dijatuli peringatan

Harus Inisiatif

Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, seharusnya KPK sudah sejak awal berniat untuk membentuk komite etik terkait banyaknya persoalan yang menerpa komisineranya. Apalagi Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyerahkan data-data pendukung kepada KPK Senin kemarin.

"KPK yang proaktif. Jangan pasif gitu. KPK harus menyelesaikan persoalan di internalnya agar tidak polemik yang berkepanjangan," ujar Politisi PDI-Perjuangan itu di Jakarta, Selasa (10/2).

Menurut Masinton, persoalan pidana Abraham Samad yang kini ditangani Mabes Polri tidak bisa mengesampingkan pembentukan komite etik. Komite etik itu sangat penting ditengah banyaknya masalah yang dihadapi para komisiner KPK. [H-14]

terlalu sedangkan Pandu dikenakan sanksi lisan.

Frans mengatakan, keberadaan Komite Etik untuk Abraham Samad tidak mengganggu konsentrasi KPK yang sekarang ini tengah mengalami perlawanan kuat imbas dari kasus Komisi Baku Gunawan (BG).

"Saya sekali tidak malah bersinergi dan memperkuat wibawa KPK, karena Komite Etik akan menjaga integritas pimpinan KPK agar berhati-hati dalam bertindak dan jauh dari 'abuse of power' apalagi berpolitik. Kalau ada yang ditindak itu dalam rangka menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, sebaiknya KPK membentuk Komite Etik secara permanen agar dugaan pelanggaran-pelanggaran etika pimpinan KPK dapat segera diperiksa. Permanennya Komite Etik

diyakini bakal menjaga kepercayaan publik terhadap badan antikorupsi itu.

"Pengalasan atas etika dan moral personal KPK perlu apalagi pimpinannya untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas pimpinannya. Orang bisa berganti tetapi lembaga KPK harus terus dipertahankan. Sementara ini harapan memberantas korupsi dipundakanya nanti diharapkan Polri dan kejaksanaan bergabung memerangi korupsi," katanya.

Pakar hukum Margarito Kamis mengatakan, dibentuknya Komite Etik untuk menelusuri dugaan etik Abraham Samad tergantung dari kuantanya bukti-bukti Hasto yang sebelum diundang KPK lebih memilih memberikan ke media dan memenuhi undangan Komisi III bahkan, bersaksi di Bareskrim Polri. [F-5YUS/H-14-C-6/E-11]